

ABSTRAKSI

Perkembangan Indonesia di bawah pemerintahan orde baru mengalami kemajuan yang cukup pesat. Sejak presiden Suharto memegang kekuasaan pada tahun 1966, pemerintah berusaha mengembangkan program stabilisasi sebagai faktor penggerak pertumbuhan ekonomi. Resesi yang melanda dunia pada periode 1980-an telah berdampak pada perekonomian Indonesia. Resesi tersebut dipicu oleh berbagai faktor, salah satunya adalah turunnya harga minyak dunia. Pemerintah Indonesia mengalami defisit anggaran yang berat akibat turunnya harga minyak dunia dan menjadi salah satu faktor munculnya resesi ekonomi di Indonesia.

Dari fakta di atas, penulis mengambil satu permasalahan yaitu munculnya resesi dunia yang berdampak kepada resesi perekonomian Indonesia, sehingga seluruh sektor perekonomian khususnya bidang moneter dan keuangan merasakan dampak dari permasalahan tersebut. Pokok pembahasan skripsi ini didasarkan pada 3 pokok permasalahan, yaitu : resesi ekonomi Indonesia , devaluasi mata uang rupiah terhadap dollar AS, dan paket kebijakan liberalisasi perbankan 1 Juni 1983 sebagai salah satu solusi bagi perbaikan ekonomi Indonesia.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penulisan sejarah, yang meliputi pemilihan topik, heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Hal ini dilakukan untuk memperoleh kajian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian ini menemukan bahwa munculnya resesi ekonomi Indonesia pada periode 1980-an tidak lepas dari ketergantungan anggaran pemerintah kepada hasil penjualan minyak dunia. Tingginya harga minyak dunia pada periode 1970-an telah menjadikan pemerintah kurang mampu mengatasi persoalan defisit anggaran ketika harga minyak turun. Hal tersebut merupakan salah satu faktor yang membawa Indonesia pada depresi perekonomian. Pemerintah berupaya untuk menyelamatkan defisit anggaran negara. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mendevaluasi mata uang rupiah pada dollar AS pada bulan Maret 1983.

Kebijakan lain yang diambil pemerintah adalah liberalisasi perbankan pada bulan Juni 1983. Kebijakan tersebut dikeluarkan sebagai respon atas tuntutan perbankan khususnya perbankan milik negara yang meminta agar perbankan diberikan kebebasan untuk menentukan kebijakan khususnya dalam penentuan pagu kredit dan bunga baik pada simpanan maupun pinjaman. Kebijakan 1 Juni 1983 juga dimaksudkan sebagai antisipasi pemerintah untuk menarik dana-dana masyarakat yang ditempatkan pada perbankan luar negeri, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional tumbuh kembali dan diharapkan bisa memperbaiki kondisi makro ekonomi Indonesia. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur sebagai perbankan milik negara yang dikelola oleh Pemerintah Daerah menjadi salah satu objek dari keluarnya kebijakan liberalisasi perbankan. Secara umum, BPD Jatim mampu mengoptimalkan kinerjanya dengan keluarnya paket kebijakan liberalisasi perbankan 1 Juni 1983.

Kata kunci : Resesi ekonomi, devaluasi, dan liberalisasi perbankan.